

MANAJEMEN PEMERINTAHAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DALAM PENGELOLAAN KAMPUNG BUDAYA DI KABUPATEN KARAWANG

Syifa Fauzia Rohman¹, Dadan Kurniansyah², Rachmat Ramdani³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia ^{1,2,3}
E-mail: Syifarohman71@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan mengenai pengelolaan Kampung Budaya meliputi belum adanya perencanaan yang matang, kurangnya sumber daya manusia, modal dan sarana prasarana, kurangnya koordinasi dan kepemimpinan serta belum dapat dirasakan oleh masyarakat dan belum dapat berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Karawang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pemerintahan dalam pengelolaan Kampung Budaya masih belum optimal. Dari segi perencanaan Disparbud belum memiliki perencanaan yang belum tertuang di dalam Renstra. Belum optimalnya subfungsi pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan belum ditandai dengan masih kurangnya SDA, SDM dan SDB. Belum optimalnya subfungsi penggunaan sumber-sumber pemerintahan yang ditandai dengan belum berjalannya komunikasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan dan kepemimpinan pemerintahan. Sedangkan dari segi kontrol pemerintahan belum dapat melaksanakan kontrol secara optimal, ditandai dengan belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Kata Kunci: *Manajemen Pemerintahan, Pengelolaan, Kampung Budaya Kabupaten Karawang*

ABSTRACT

Problems regarding the management of the Cultural Village include the lack of careful planning, lack of human resources, capital and infrastructure, lack of coordination and leadership and have not been felt by the community and have not been able to contribute to the PAD of Karawang Regency. The results of this study indicate that government management in the management of Kampung Budaya is still not optimal. In terms of planning, Disparbud does not have a plan that has not been stated in the Strategic Plan. The sub-function of organizing resources is not yet optimal, which has not been marked by the lack of natural resources, human resources and natural resources. The sub-function of resource use is not yet optimal, which is indicated by the lack of government communication, government and government coordination. In terms of control, the government has not been able to carry out control optimally, marked by the lack of maximum supervision carried out by the Department of Tourism and Culture of Karawang Regency.

Keywords: *Government Management, Management, Cultural Village of Karawang Regency.*

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini, tidak hanya dalam industri dan pariwisata saja yang akan menjadi faktor pendorong utama perekonomian daerah, faktor kebudayaan juga dapat memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya terhadap sektor kebudayaan sebagai salah satu aset daerah. Sektor kebudayaan merupakan kegiatan yang tak pernah mati bahkan untuk pemerintah daerah, sektor kebudayaan juga akan menjadi suatu pendapatan tambahan selain dari sektor pariwisata bagi daerah itu sendiri. perkembangan kebudayaan akan mendongkrak sektor yang lain. seperti: kunjungan wisatawan, ekonomi kreatif, membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran. Sektor kebudayaan tidak bisa berdiri sendiri dan harus didukung oleh kegiatan-kegiatan penunjang lainnya, yaitu: promosi kebudayaan, fasilitas yang ditawarkan, akses transportasi dan tempat penginapan.

Kampung budaya merupakan Aset dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang dan salah satu obyek daya tarik wisata sesuai dengan Peraturan Bupati NO. 32 Tahun 2010 tentang Kampung Budaya sebagai Gerbang Karawang. Pemerintah daerah melimpahkan wewenang pengelolaan kebijakannya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan Keputusan Bupati nomor

430/Kep.307-Huk/2015 tentang penunjukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karawang sebagai pengelola Kampung Budaya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, terdapat beberapa masalah yang menyebabkan pengelolaan kampung budaya belum berjalan dengan optimal. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah kurang matangnya perencanaan dalam pengelolaan kampung budaya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang sebagai perangkat daerah yang diberi mandat oleh pemerintah daerah sebagai Pengelola kampung budaya, belum mampu merumuskan perencanaan pengelolaan dan pengembangan secara matang, hal ini dapat dilihat dari bab II Renstra (Rencana Strategi) Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang dalam sub bagian kinerja pelayanan SKPD yang hanya menjelaskan perencanaan tentang destinasi pariwisata kreatif tidak secara spesifik merumuskan perencanaan pengelolaan dan pengembangan kampung budaya. Akibatnya, pengelolaan dan pembangunan kampung budaya belum dapat berjalan dengan baik. Permasalahan berikutnya adalah belum optimalnya pengorganisasian sumber-sumber pendukung keberlangsungan pengelolaan kampung budaya, sumber-sumber pendukung diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, Sumber Daya

Modal, Sumberdaya Sarana dan Prasarana, serta Sumber Daya lainnya. Untuk sumber daya manusia, kualitas maupun kuantitas baik yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengelolaan kampung budaya masih belum memadai. Permasalahan berikutnya adalah belum efektifnya penggunaan sumber-sumber pendukung dalam pengelolaan kampung budaya. Penggunaan sumber-sumber pendukung ini meliputi beberapa aspek seperti komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan.

Untuk aspek koordinasi, komunikasi dan kepemimpinan berdasarkan hasil pra observasi di lapangan, menurut pengelola kampung budaya keberlangsungan maju atau tidaknya kampung budaya ada di bawah naungan bidang pengembangan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang mempunyai kewenangan mengeluarkan anggaran dan rancangan pemeliharaan kampung budaya. belum optimalnya koordinasi, komunikasi dan kepemimpinan yang dilakukan antara pengelola kampung budaya dengan bidang Pengembangan Destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terkait untuk keberlangsungan pengelolaan kampung budaya. Berdasarkan hasil peneliti di lapangan, peneliti melihat bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang sebagai pelaksana kurang melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pengelolaan kampung budaya. karena

sampai saat ini perencanaan tentang perbaikan pengelolaan kampung budaya belum menjadi prioritas dan konsep pengelolaan belum dijelaskan secara khusus oleh Dinas pariwisata dan Kebudayaan. Tetapi menurut Pengelola Kampung budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dijelaskan secara umum melalui Peraturan Bupati No 41 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Karawang. Tentang pengelolaan objek daya tarik wisata di Kabupaten Karawang bagian pengawasan pasal 11 yang berbunyi, Bupati melakukan kontrol pengelolaan dan pemberdayaan objek dan daya tarik wisata yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Permasalahan yang telah diuraikan diatas mengenai pengelolaan kampung budaya yang belum optimal dapat ditangani oleh tata kelola manajemen pemerintahan. Menurut (Ndraha, 2011:160) terdapat pada ruang lingkup manajemen pemerintahan yang terlihat melalui variabel fungsi manajemen yaitu perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber - sumber pemerintahan dan kontrol pemerintahan.

Peneliti melihat bahwa dalam pengelolaan yang belum optimal yang terjadi di Kampung Budaya dengan menggunakan teori manajemen pemerintahan. Oleh karena itu diuraikan serta gejala-gejala yang ditemukan penulis di lapangan peneliti mengambil teori manajemen pemerintahan dari

Taliziduhu Ndraha karena teori ini dianggap relevan dan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan, maka peneliti tertarik untuk melakukan Penelitian yang berjudul “**Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kampung budaya di Kabupaten Karawang**”.

KAJIAN PUSTAKA

1. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan disebut manajemen public merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi sektor swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sektor swasta. (Ndraha, 2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya: (1) Asas dan sistem pemerintahan. (2) Hukum tata pemerintahan. (3) Ekologi Pemerintahan. (4) Filsafat dan Etika Pemerintahan. (5) Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan. manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan rakyat. keberadaan pemerintahan juga merupakan salah satu unsur penting berdirinya sebuah negara modern, sebuah organisasi pemerintah diberikan kekuasaan (*power*) untuk menjalankan pemerintahan guna melayani kepentingan rakyat sebagai salah satu tugas pokoknya. Dalam menjalankan tugas tersebut sebuah pemerintahan harus mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku agar tercipta ketertiban dalam proses pelaksanaannya. Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan yang dimaksud (Ndraha, 2011:160), antara lain; (1) perencanaan pemerintahan, dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan organisasi dan menyusun langkah-langkah guna mencapai tujuan (konkret dan terukur) organisasi. (2) perorganisasian sumber-sumber pemerintahan, relasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumberdaya baik, SDA, SDM maupun SDB sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai. (3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dilakukan untuk menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan. (4)

Kontrol pemerintahan, dilakukan untuk menjalin kesesuaian antara target pada perencanaan dengan hasil yang diperoleh dari penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut. mengenai fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, manajemen pemerintahan secara sederhana dapat

diartikan sebagai implementasi dari fungsi-fungsi manajemen dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai ilmu terapan, manajemen itu mencakup rumusan-rumusan, prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang sudah ada secara ilmiah.

2. Konsep Pengelolaan Kampung Budaya

Kampung secara umum berarti sebuah kumpulan komunitas terdiri dari berbagai masyarakat beragam etnis atau etnis tertentu yang berdiam dalam satu wilayah dan hidup secara berkelompok dengan pola hidup sederhana memiliki aturan yang arif dan bijak dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kampung adalah kawasan yang ditinggali oleh masyarakat atau pribumi (pada masa Hindia Belanda) yang pekerjaannya sebagai pembantu pada keluarga-keluarga Eropa atau Tionghoa dan sedikit dari mereka yang masuk di sektor formal sebagai pegawai rendah di kantor pemerintah atau swasta (Mahatmanta, 2005:28). Kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansekerta "*buddhayah*", yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti "budi" atau "akal". Jadi Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai "daya budi" yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta, karsa, dan rasa itu sendiri (Koentjaraningrat, 1990:9). Kampung Budaya yang didirikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terletak di Desa Wadas,

Kecamatan Telukjambe Barat. Lokasi Kampung Budaya ini sangat strategis hanya berjarak 2 Km dari Gerbang tol Karawang Barat serta dari pusat Kota Karawang hanya berjarak 5 Km. Kampung ini dibangun sejak 2012. Kampung budaya Karawang ini dahulu merupakan persawahan pinggir aliran kali kalapa Desa Wadas Kecamatan Karawang Barat, dibangun diatas tanah seluas 4.5H. Kampung Budaya di bangun oleh Pemerintah Kabupaten Karawang OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

3. Konsep Pengelolaan Aset Daerah

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD. Dan untuk memperoleh informasi manajemen aset daerah yang memadai maka diperlukan dasar pengelolaan kekayaan aset yang memadai juga, dimana menurut (Mardiasmo, 2002) terdapat tiga prinsip dasar pengelolaan kekayaan aset daerah yakni : (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan/pemanfaatan

secara efisien dan efektif, dan (3) pengawasan (monitoring).

4. Kampung Budaya Sebagai Objek Daya Tari Wisata

Seperti yang tertuang pada Peraturan Bupati NO. 32 Tahun 2010 Bab I pasal 1 ketentuan umum bahwa “Kampung Budaya Gerbang Karawang adalah suatu Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) buatan dengan luas tertentu yang mengintegrasikan unsur-unsur budaya Karawang”. budaya lokal yang bertujuan untuk masyarakat Karawang dan untuk memperkenalkan dan melestarikan seni tradisional lokal dan adat budaya sunda yang berkualitas, serta memberi wadah untuk mengembangkan kreativitas para seniman karawang. merawat dan mendorong perkembangan pengetahuan dan kreativitas masyarakat dan para seniman karawang melalui diskusi dan workshop. Serta sebagai tempat bertukar gagasan dan kepedulian untuk menciptakan identitas unik bagi kota Lumbung Padi.

METODE

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk menjelaskan Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Kampung Budaya di Kabupaten Karawang yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk

mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian. Adapun uraian secara rinci dari metode yang digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian yang diamati atau diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Menurut (Sugiyono, 2011:12) Metode deskriptif merupakan penelitian paling sederhana, dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang lain, karena dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap objek atau wilayah penelitian. Dalam kegiatan penelitian ini peneliti hanya memotret apa yang terjadi pada diri objek atau wilayah yang diteliti, kemudian memaparkan apa yang terjadi dalam bentuk laporan penelitian secara lugas, seperti apa adanya.

Menurut (Moleong, 2011:4) pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap pengelolaan kampung budaya karawang, peneliti menggunakan pendekatan teori Manajemen Pemerintahan dari Taliziduhu Ndraha. Adapun indikator Manajemen Pemerintahan dari Taliziduhu Ndraha itu sendiri meliputi perencanaan pemerintahan (*planning*), pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan (*organizing*), penggunaan sumber-sumber pemerintahan (*actuating*), dan pengawasan pemerintahan (*controlling*).

1. Perencanaan Pemerintahan dalam Pengelolaan Kampung Budaya Kabupaten Karawang

Perencanaan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengklarifikasi tujuan dari organisasi dan menyusun langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan, merencanakan berarti mempersiapkan sesuatu yang akan terjadi serta kendala dan kemudian merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud mencapai tujuan.

Pengelolaan kampung budaya diatur dalam Perbub no 32 tahun 2010 tentang Kampung Budaya Gerbang Karawang. Maksud dibangunnya Kampung budaya adalah dalam rangka melestarikan, mengembangkan dan mempromosikan industri pariwisata khususnya seni dan budaya Karawang di Indonesia dan mancanegara sehingga dapat mendukung pembangunan perekonomian masyarakat. Adapun tujuan dibangunnya kampung budaya

tercantum dalam Pasal 3 yang menjelaskan bahwa :

1. Terpeliharanya nilai-nilai seni dan budaya masyarakat Karawang;
2. Terpupuknya rasa cinta dan meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai seni dan budaya;
3. Tersedianya wadah bagi pelaku seni dan budaya dalam melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan di Kabupaten Karawang;
4. Sebagai ODTW yang mengintegrasikan unsur-unsur budaya;
5. sarana dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. sarana memperkuat jati diri dan kearifan budaya lokal serta menguatkan daya saing daerah.

Maksud dan tujuan dari Perbub no 32 tahun 2010 tentang Kampung Budaya Gerbang Karawang belum berjalan secara optimal. Hal ini diakui oleh Kepala Seksi Pengembangan destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif sebagai pengelola kampung budaya yang mengatakan bahwa perencanaan pengelolaan kampung budaya saat ini belum bisa dilakukan sesuai perbub yang mengaturnya

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pengelolaan kampung budaya belum dijalankan sesuai dengan Perbub yang mengatur kewenangan perencanaan pengelolaan dibangunnya

Kampung Budaya, serta terdapat ketidaksinergian antara Disparbud (pengelola) dan pemerintah daerah (yang mempunyai kebijakan). Karena perencanaan yang baik adalah perencanaan yang memiliki tujuan yang jelas dan cara penyampaian yang mendukung. Sehingga perencanaan pengelolaan kampung budaya bisa dikatakan belum berjalan secara optimal.

2. Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Dalam Pengelolaan Kampung Budaya di Kabupaten Karawang

Menurut Ndraha perorganisasian sumber-sumber pemerintahan, relasi (implementasi) langkah-langkah tersebut memerlukan sumberdaya baik, SDA, SDM maupun SDB sebelum digunakan, sumber daya harus diorganisasikan agar siap pakai.

Pembentukan organisasi merupakan cara untuk megumpulkan orang-orang dan kemudian ditetapkan berdasarkan kemampuan masing-masing, organisasi yang dibentuk diharapkan dapat memberikan suatu penyampaian ataupun memberikan sebuah aspirasi dari perencanaan yang dibuat, dalam pembentukan organisasi adalah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi dan pembagian kerja.

Dalam pasal 13 Peraturan Bupati NO. 32 Tahun 2010 tentang kampung budaya gerbang karawang juga mengatur agar pemerintah daerah

mengatur untuk membentuk organisasi yang berkenaan langsung dengan pengelolaan kampung budaya. “Bupati dapat membentuk tim khusus dalam pengelolaan Kampung Budaya Gerbang Karawang atas usul kepala dinas. (2) Tim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pelaku seni, budaya lokal, profesional, pengusaha dan masyarakat yang bertanggung jawab kepada bupati melalui kepala dinas.”

Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan kampung budaya belum diatur secara resmi dan bahkan pengelolaan kampung budaya ini belum berjalan. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Seksi Destinasi Wisata dan Ekonomi Kreatif bahwa pengorganisasian kampung budaya belum secara resmi dirancang karena belum dibuatkannya UPTD khusus untuk pengelolaan kampung budaya. Berikut adalah sumber daya ketenagaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

NO	G O L	JABATAN	JU ML AH	KETER ANGA N
1.	I V /	Kepala Dinas	1	Eselon II/b
2.	I V /	Sekretaris Kepala Bidang	1 1	Eselon III/a Eselon III/b
3.	I V /	Kepala Bidang Kepala Seksi	2 1 1	Eselon III/b Eselon IV/a
	a	Pelaksana		-

4.	II I/ d	Kepala Seksi/Kasub ag	7	Eselon IV/a
5.	II I/ c	Kepala Seksi Pelaksana	3 4	Eselon IV/a -
6.	II I/ b	Kasi Pelaksana	1 9	Esselon IV/a -
7.	II I/ a	Pelaksana	2	-
8.	II / d	Pelaksana	0	-
9.	II / c	Pelaksana	4	-
10.	II / b	Pelaksana	0	-
Jumlah :			37	

Selanjutnya dalam aspek sumber daya modal yang diatur dalam pasal 14 Peraturan Bupati NO. 32 Tahun 2010 tentang Pembiayaan Kampung Budaya Gerbang Karawang

“bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. Sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Namun dalam kenyataannya sumber daya modal pengelolaan kampung budaya hanya bersumber dari

APBD Kabupaten seperti yang dikatakan oleh Kasie Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Selanjutnya dalam aspek sarana dan prasarana, seperti yang tertuang dalam Renstra (Rencana Strategi) Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang tahun 2016-2021:

“Prasarana dan sarana wisata di obyek daya tarik wisata masih belum sesuai standar, terutama pada obyek dan daya tarik wisata yang berada di kawasan wisata”

Kampung budaya adalah salah satu objek daya tarik wisata (ODTW) seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati NO. 32 Tahun 2010:

“bahwa Kampung budaya sebagai salah satu Objek Daya Tarik Wisata”. Kondisi sarana dan prasarana kampung budaya saat ini tidak layak dan Disparbud belum bisa menindaklanjuti dalam hal perbaikannya karena sumber daya modal yang menjadi hambatannya. Hal ini diakui oleh Kasie Destinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang.

Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pengelolaan kampung dapat dilihat dari ketiga aspek pengorganisasian pemerintahan yaitu, aspek sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya sarana dan prasarana yang Dalam hal ini pengorganisasian sumber daya manusia menjadi faktor krusial yang menyebabkan pengorganisasian

sumber-sumber pemerintahan belum dapat dilakukan dengan baik selain itu perencanaan yang belum matang juga turut menjadikan pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan tidak berjalan dengan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang Dalam Pengelolaan Kampung Budaya di Kabupaten Karawang

Implementasi daripada sumber-sumber pemerintahan yang ada diharapkan akan membantu terhadap permasalahan mengenai Pengelolaan Kampung budaya di Kabupaten Karawang, dalam penggunaan sumber-sumber pemerintahan memiliki tiga sub fungsi seperti komunikasi pemerintahan, koordinasi pemerintahan serta kepemimpinan pemerintahan, dimana ketiga sub fungsi ini harus berjalan dengan baik. Dalam suatu penggunaan sumber-sumber pemerintahan, komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan pemerintahan memiliki peranan yang sangat penting tidak hanya dalam proses implementasi tersebut namun juga pada tahap-tahap pembuatan dan pelaksanaan tersebut mulai dari tahap perencanaan atau penyusunan agenda, tahap pengorganisasian pemerintahan, penggunaan pemerintahan dan kontrol pemerintahan. komunikasi menunjuk pada bagaimana interaksi yang terjalin antar para implementor terkait pengelolaan Kampung Budaya di

Kabupaten Karawang mengingat mengatasi permasalahan pengelolaan kampung budaya tidak bisa dikerjakan hanya cukup 1 dinas saja akan tetapi juga perlu komunikasi dan kerjasama dengan Dinas terkait lainnya sebagai penunjang dalam penyempurnaan pengelolaan Kampung Budaya.

Menurut (Ndraha, 2011:161) fungsi penggunaan sumber-sumber pemerintahan merupakan fungsi penggunaan seluruh sumber daya organisasi untuk bergerak secara ikhlas ke arah pencapaian tujuan. Menurut Ndraha dalam fungsi penggunaan sumber-sumber pemerintahan (actuating) ini meliputi berbagai sub fungsi, seperti komunikasi (komunikasi pemerintahan), koordinasi (koordinasi pemerintahan), dan kepemimpinan (kepemimpinan pemerintahan). Dari ketiga sub fungsi tersebut, apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai Manajemen Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam Pengelolaan Kampung Budaya di Kabupaten Karawang bila dilihat dari variabel fungsi penggunaan sumber-sumber pemerintahan kaitannya dengan sub fungsi komunikasi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pengkomunikasian terhadap para pengelola terkait pengelolaan kampung budaya sudah dilakukan dengan cukup

baik. seperti yang diungkapkan Bapak Kustia Wildan prayana, S.STpar selaku Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pengelolaan kampung budaya telah melakukan komunikasi dengan pengelola lapangan maupun petugas pemelihara dan keamanan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan kampung budaya. Dalam ayat 2 pasal 10 Peraturan Bupati NO. 32 Tahun 2010 tertera bahwa “Pemerintah Daerah dapat membentuk organisasi pelestarian serta pengembangan nilai seni dan budaya lokal yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, akademis dan para pakar/seniman serta budayawan” tetapi dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melalui pernyataan Bapak Kustia Wildan yang menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan kampung budaya belum melibatkan salah satu unsur dari perbub bahwa pengelolaan kampung budaya seyogyanya melibatkan beberapa unsur salah satunya masyarakat, seniman dan budayawan. Karena pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan dalam pengelolaan kampung budaya belum diatur secara resmi. subfungsi komunikasi belum berjalan secara optimal, dikarenakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum dapat

melibatkan masyarakat, seniman dan budayawan. Pola pengkomunikasian yang dijalin akan berpengaruh pula pada pengelolaan yang sedang dilakukan, komunikasi yang baik akan melancarkan pengelolaan yang sedang di lakukan dan pola komunikasi yang kurang baik akan menimbulkan kesalahpahaman yang akan terjadi. menurut kaside Destinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif koordinasi yang dijalakan antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dengan petugas pemelihara pengelola kampung budaya yang belum berjalan dengan efektif karena Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum bisa berkoordinasi dengan beberapa instansi yang dapat membantu memaksimalkan pengelolaan kampung budaya. berdasarkan pengamatan peneliti selama melakukan observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang hanya sebatas merespon terhadap situasi-situasi tertentu di lapangan. hal ini mengakibatkan sering terjadinya ketidak selarasan pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan kampung budaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Yang dilakukan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang sudah dengan cukup tanggap dalam pengelolaan kampung budaya seperti yang peneliti dapatkan pada sat mewawancarai Kaside Destinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

kepemimpinan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang sudah berjalan dengan baik yang ditandai dengan tanggapnya kepala dinas terkait pengelolaan kampung budaya. hal ini mengakibatkan para pengelola kampung budaya menjadi segan dan menghormati kepala Dinas. Meskipun demikian hal tersebut belum bisa menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinan pemerintahan dalam hal ini terkait pengelolaan Kampung Budaya. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan apabila semua berjalan secara optimal Berdasarkan ketiga sub fungsi penggunaan sumber-sumber pemerintahan tersebut, yakni komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan sangat berpengaruh dengan nilai pencapaian yang akan didapat khususnya dalam pengelolaan kampung budaya, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang belum dapat melaksanakan ketiga sub fungsi dengan baik dengan baik akibatnya proses pelaksanaan pengelolaan kampung budaya belum dapat berjalan baik. Sehingga Kampung Budaya belum dapat menghasilkan PAD secara maksimal untuk Kabupaten Karawang.

4. Kontrol Pemerintahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam Pengelolaan Kampung Budaya di Kabupaten Karawang

Fungsi manajemen pemerintahan adalah fungsi kontrol pemerintahan

terhadap apa yang sudah dilaksanakan mulai dari perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan dan penggunaan sumber-sumber pemerintahan yang kemudian dilakukan sebuah tindakan berupa feedback demi penyempurnaan permasalahan di masa yang akan datang. Fungsi kontrol pemerintahan atau yang biasa disebut pengawasan merupakan fungsi dalam manajemen yang didalamnya terkandung kegiatan perbaikan dan penyempurnaan sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi kontrol pemerintahan sangat erat kaitanya dengan fungsi penggunaan sumber-sumber pemerintahan karena yang diawasi adalah bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Sementara itu fungsi penggunaan sumber-sumber pemerintahan erat kaitanya dengan fungsi pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan karena yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan pengorganisasian-pengorganisasian yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan erat kaitanya dengan fungsi perencanaan pemerintahan karena pengorganisasian yang telah ditetapkan apakah sudah sesuai dengan rencana dan tujuan yang ingin dicapai. Fungsi perencanaan pemerintahan sendiri erat kaitanya dengan fungsi kontrol pemerintahan karena rencana dengan tujuan yang ingin dicapai apakah sudah

memperhatikan feedback hasil dari pada pengawasan yang telah dilakukan.

Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan supaya dapat berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perencanaan. Fungsi pengawasan yang baik adalah berupa hasil ataupun masukan yang kritis dan konstruktif, apa adanya dan objektif, dimana dengan adanya pengontrolan terhadap apa yang sudah dijalankan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik dan mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang. Kaitanya dengan pengelolaan kampung budaya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang sebagai pengelola belum dapat menjalankan kontrol pemerintahan dengan baik. Akibatnya pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan pengorganisasian dan hanya berjalan apa adanya, sehingga kontrol pemerintahan tidak dapat berjalan dengan efektif karena pelaksanaannya pun tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan hal ini, peneliti bertanya kepada Bapak Kustia Wildan selaku Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang mengenai tingkat keberhasilan pengelolaan kampung budaya dan beliau menjelaskan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Karawang hanya terfokus kepada pencapaian target PAD saja terkait dengan keberhasilannya dalam pengelolaan Kampung Budaya tidak melihat aspek lain seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya sarana dan prasarana Kampung Budaya. berdasarkan pernyataan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang sebagai pengelola belum dapat menjalankan pengawasan dengan efektif. Selain itu peneliti juga mencoba bertanya ke beberapa pihak lainnya seperti pengelola kampung budaya, seniman karawang, pengunjung, dan pemilik restoran terhadap pengelolaan kampung budaya. Mereka juga mengomentari tentang kurang baiknya pengelolaan yang ada di kampung budaya Karawang. Mendengar hal tersebut Bapak Kustia Wildan, S. Stpar selaku Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang menanggapi sebagai berikut :

“untuk perbaikan sarana dan prasarana kampung budaya akan kami lakukan setelah pematangan konsep perencanaan pengelolaan agar dalam pelaksanaannya kami bisa menjalankan secara optimal. Saat ini kami masih kekurangan sumber daya manusia, sumber daya modal jadi kami bisa lakukan pengelolaan yang maksimal setelah kami matangkan konsep perencanaannya. Tanggapan dan saran dari masyarakat akan kami jadikan acuan untuk kami kedepannya agar bisa

melaksanakan kegiatan pengelolaan kampung budaya secara efektif dan efisien.”.”(wawancara dengan Bapak Kustia Wildan prayana,S.ST par selaku Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang senin, 13 juli 2020).

Berdasarkan pernyataan Bapak Kustia Wildan di atas, dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang telah merespon keluhan dan masukan pengunjung, pemilik restaurant, seniman Karawang serta masyarakat terhadap pengelolaan kampung budaya dengan akan melakukan perbaikan serta pengembangan pengelolaan dan sarana serta prasarana yang ada di kampung budaya.

Berdasarkan penjelasan diatas pengawasan pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang terhadap sebuah perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan organisasi dalam pengelolaan kampung budaya, sebenarnya sudah dapat merespon keluhan dan masukan masyarakat mengenai pengelolaan kampung budaya. namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang belum memiliki perencanaan dan pengorganisasian yang matang dan jelas, pengawasan yang dilakukan pun masih bersifat responsif terhadap keluhan dan saran-saran masyarakat. Pengawasan yang dilakukan tidak berjalan dengan

continue, akibatnya jika tidak ada masukan dari masyarakat, maka besar kemungkinan tidak ada perbaikan terhadap pengelolaan kampung budaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Manajemen Pemerintahan yang telah dilakukan Perencanaan pemerintahan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Kampung Budaya belum dapat dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang yang mengatur tentang pembangunan dan pengelolaan Kampung Budaya. Pertama adalah kurangnya sumber daya manusia yang dapat dibuktikan dengan belum adanya struktur kepengurusan resmi dalam pengelolaan Kampung Budaya., Kedua adalah kurangnya sumber daya modal dalam proses pengelolaan Kampung budaya dan yang ketiga adalah belum memadainya sumber daya sarana dan prasarana dalam pengelolaan Kampung budaya. Penggunaan Sumber-sumber Pemerintahan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Kampung Budaya belum berjalan dengan maksimal. Kontrol Pemerintahan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang dalam pengelolaan Kampung Budaya belum berjalan Dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari belum continue nya kontrol oleh Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan Kabupaten Karawang
dalam pengelolaan Kampung budaya.

Ndraha, T. (2011). *Kybernologi* (Jilid 1). Rineka Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Koentjaraningrat. (1990). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Aksara Baru.

Peraturan Bupati NO. 32 Tahun 2010. (n.d.).

Mahatmanta. (2005). *Pengertian Kampung*.

Peraturan Bupati No 41 Tahun 2018 Tentang pengelolaan objek daya tarik wisata di Kabupaten Karawang. (n.d.).

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Paradigma Baru Pengolahan Keuangan Sektor Publik*. Andi.

Renstra (Rencana Strategi) Dinas Pariwisata Kabupaten Karawang. (n.d.).

Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda karya.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*. CV Alfabeta.

Ndraha, T. (2003). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru* (Jilid 1). Rineka Cipta.